



## PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

# INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman [inspektorat.majalengkakab.go.id](http://inspektorat.majalengkakab.go.id) Pos-el [inspektorat@majalengkakab.go.id](mailto:inspektorat@majalengkakab.go.id)

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Sekretaris Daerah  
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Sekretariat Daerah**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **84** dengan predikat **“A”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Memuaskan”**, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

| Komponen yang dinilai                      | Bobot      | Nilai 2024 |
|--|------------|------------|
| a. Perencanaan Kinerja                     | 30         | 28         |
| b. Pengukuran Kinerja                      | 30         | 28.6       |
| c. Pelaporan Kinerja                       | 15         | 9.9        |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 17.5       |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>                | <b>100</b> | <b>84</b>  |
| <b>Predikat AKIP</b>                       |            | <b>A</b>   |

**Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah. Tahun 2024 sebagai berikut:**

1.) Perencanaan Kinerja

2.) Pengukuran Kinerja

1. Belum ada informasi yang menyatakan perbaikan kinerja sebagai tindaklanjut hasil pengukuran kinerja

3.) Pelaporan Kinerja

1. analisa faktor-faktor keberhasilan/kegagalan belum mendalam dan komprehensif,
2. Laporan Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment,
3. Laporan Kinerja belum dijadikan dasar perbaikan dokumen perencanaan, aktivitas kinerja dan strategi yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya.

#### 4.) Evaluasi Internal

1. Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE AKIP tidak relevan dengan Rekomendasi LHE AKIP
2. Tidak ada SK Tim Evaluasi dan anggota Tim yang telah mengikuti Bimtek SAKIP
3. Terdapat tabel Realisasi Rencana Aksi Tindak Lanjut tetapi Link bukti dukung hanya 1 point dari 3 point yang ada.
4. Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti secara keseluruhan, hanya 1 point yang sudah ditindaklanjuti dari 3 point yang ada.
5. Belum ada peningkatan Nilai SAKIP secara keseluruhan, hanya 1 dimensi yang meningkat nilainya.

### **3. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

1. Lengkapi dengan cross cutting

#### 2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

1. Lengkapi dengan informasi yang menyatakan perbaikan kinerja sebagai tindaklanjut hasil pengukuran kinerja

#### 3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Agar menganalisa faktor-faktor pendukung keberhasilan/kegagalan secara mendalam dan komprehensif.
2. Laporan Kinerja agar dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment bagi Pegawai
3. Laporan Kinerja agar dijadikan dasar dalam perbaikan dokumen perencanaan, aktivitas kinerja dan strategi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya

#### 4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Agar Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE AKIP dibuat relevan dengan Rekomendasi LHE AKIP
2. Agar ada SK Tim Evaluasi dan anggota Tim yang telah mengikuti Bintek SAKIP
3. Agar dilengkapi link bukti dukung Realisasi Rencana Aksi Tindak Lanjut.
4. Agar Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti secara keseluruhan
5. Agar melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga diharapkan bisa meningkatkan Nilai SAKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Sekretariat Daerah. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Sekretariat Daerah. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka